

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total bobot/skor untuk praktek akuntansi yang dijalankan oleh SKPD adalah 1410 sementara total bobot/skor untuk teori yang berlaku adalah 1.700 dengan penyimpangan sebesar -290 dengan demikian persentase positif praktek akuntansi sebesar 82,95% dan penyimpangan negatif adalah sebesar 17,05%, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan sebesar 17,05%. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa proses akuntansi yang diterapkan serta laporan keuangan yang disajikan sebagian besar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri serta teori-teori yang berlaku lainnya terkait dengan proses akuntansi pada SKPD.

Setelah penelitian dilakukan, diketahui bahwa penyimpangan penyimpangan terjadi pada buku jurnal, buku besar, buku besar pembantu, daftar saldo buku pembantu, neraca lajur, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal balik dengan tingkat penyimpangan yang berbeda beda. Selain itu untuk bukti transaksi dan laporan keuangan sudah disajikan dengan baik, maka diberikan skor 100.

3.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian menyadarimasi terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini:

1. Penelitian hanya dilakukan terhadap satu SKPD yang terdapat di Kota Bukittinggi. Hal ini tentunya tidak dapat mewakili keadaan pada SKPD lain yang mungkin hasilnya akan berbeda-beda di setiap SKPD.

2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data yang digunakan dari data primer, kemudian data yang diperoleh dianalisis berdasarkan peraturan dan teori yang berlaku. Penulis merasa masih banyak terdapat kekurangan dalam menganalisis dan memberikan skor pada bukti-bukti transaksi, jurnal, buku besar, dan laporan keuangan SKPD. Karena dalam pemberian skor terdapat faktor subjektif dari penulis dan juga dari hasil diskusi dengan dosen pembimbing.

3.3 Saran

Pemerintah sebaiknya melakukan peningkatan kualitas pegawai yang sudah ada dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terkait dengan adanya perubahan-perubahan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri, dan Standar Akuntansi Pemerintah serta pelatihan terhadap program baru yang diberikan sehingga ilmu yang dikuasai oleh pegawai terus berkembang dan sesuai dengan kemajuan dan perubahan yang ada. Selain itu pengendalian dan pengawasan juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses akuntansi yang dilaksanakan oleh pegawai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

